LEX LECTIO LAW JOURNAL

Lex Lectio : *Jurnal Kajian Hukum*
Volume 05 No. 01. Tahun 2026
E-ISSN: 3025-3276

ETHICRISE: FRAMEWORK KEPEMIMPINAN DIGITAL BERETIKA BERBASIS PANCASILA BAGI GENERASI MUDA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Mhd Rajab Perangin Angin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana, Medan
qrajaaq@gmail.com

Abstract *This study explores EthicRise as a fresh perspective on ethical digital leadership for Indonesia's young generation. Instead of focusing solely on technological skills, the research addresses three core issues: the growing ethical challenges in the online sphere, the key elements of the EthicRise model that combine Pancasila values with digital expertise and social responsibility, and the importance of multi-stakeholder collaboration for meaningful implementation. Built through conceptual reflection and a structured literature review, the findings reveal that digital education focused merely on technical ability cannot cultivate leaders with integrity. EthicRise offers a more grounded direction through three interconnected pillars: character formation, ethical use of technology, and long-term social contribution. The study concludes that this approach holds strong potential to support Indonesia's leadership development toward 2045 by encouraging young leaders who prioritize values and social accountability alongside digital mastery.*
Keywords: *Ethical Leadership; Digital Youth; EthicRise; Pancasila*

Abstrak *Penelitian ini menelaah EthicRise sebagai sebuah framework kepemimpinan digital beretika bagi generasi muda Indonesia. Alih-alih hanya menekankan kemampuan teknologi, kajian ini memusatkan perhatian pada tiga persoalan pokok: meningkatnya problem moral dalam kepemimpinan digital, unsur-unsur kunci EthicRise yang memadukan nilai Pancasila dengan kecakapan teknologi serta tanggung jawab sosial, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penerapannya. Melalui refleksi konseptual dan telaah literatur, ditemukan bahwa*

pembelajaran digital yang berfokus pada keahlian teknis semata tidak cukup untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas. EthicRise menawarkan arah yang lebih komprehensif melalui tiga pilar yang saling menguatkan, yakni pembentukan karakter, penguasaan teknologi yang beretika, dan kontribusi sosial yang berkelanjutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa EthicRise memiliki peluang besar untuk memperkuat transformasi kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045 dengan mendorong lahirnya generasi pemimpin digital yang berorientasi nilai dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Kata kunci: *Kepemimpinan Etis; Pemuda Digital; EthicRise; Pancasila*

Pendahuluan

Era digital telah menghadirkan tantangan kepemimpinan baru bagi generasi muda, yang ditandai dengan penetrasi media sosial mencapai 78,19% dari total populasi Indonesia atau sekitar 215,63 juta pengguna (Panggabean, 2024). Kemajuan ini melahirkan figur-figur influencer, pemimpin opini digital, dan aktivis daring yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan sosial, terutama menjelang puncak bonus demografi pada 2030 sampai 2045. Badan Pusat Statistik Indonesia (2023) memproyeksikan proporsi penduduk usia produktif (15 sampai 64 tahun) sebesar 68,28% pada 2030 dan 65,79% pada 2045.

Di tengah pertumbuhan tersebut, persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah absennya kode etik khusus bagi para influencer di Indonesia. Ketiadaan regulasi ini memicu krisis kepemimpinan digital, di mana tidak sedikit pemimpin daring yang lebih mengutamakan viralitas dan engagement ketimbang dampak sosial yang berkelanjutan dan integritas moral. Manifestasinya tampak nyata dalam sejumlah kasus konkret: penangkapan influencer Alnaura Karima Pramesti dalam kasus penipuan investasi pada Oktober 2024; keterpilihan lebih dari dua puluh influencer sebagai anggota parlemen tanpa kapasitas kepemimpinan yang terukur; serta

meningkatnya kasus fraud yang melibatkan figur digital sepanjang 2022 sampai 2024. Reuters Institute Digital News Report 2025 mencatat bahwa 47% responden global menyetarakan influencer dengan politisi nasional dalam hal penyebaran informasi palsu (Newman et al., 2025).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk merespons krisis ini. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjalankan program Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Leadership Academy (DLA) yang menargetkan 9 juta talenta digital hingga 2030. UNDP bersama Microsoft meluncurkan program Skill Our Future untuk 400.000 pemuda Indonesia. Sementara itu, Dewan Pers mendorong inisiatif literasi digital, dan kampanye #YouthLead pada Hari Pemuda Internasional 2024 mempromosikan ruang digital yang aman dan inklusif. Meskipun demikian, pendekatan-pendekatan tersebut masih meninggalkan celah kritis: fokus berlebih pada technical skills tanpa penguatan karakter moral, keterputusan antara nilai kearifan lokal dengan tantangan digital kontemporer, serta ketiadaan framework kepemimpinan digital yang benar-benar holistik dan berorientasi pada dampak sosial jangka panjang.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal nilai yang tidak ternilai untuk menjawab celah tersebut: Pancasila sebagai weltanschauung bangsa, filosofi gotong royong yang menekankan tanggung jawab kolektif, tradisi musyawarah mufakat yang mendorong demokrasi deliberatif, serta kearifan lokal dari lebih dari 600 kelompok etnis. Keseluruhan kekayaan kultural ini memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan kompetensi digital guna menciptakan model kepemimpinan yang autentik, humanis, dan berkelanjutan.

Bertolak dari analisis tersebut, penelitian ini memperkenalkan gagasan EthicRise, yaitu akronim dari Ethical Renaissance in Social Innovation and Cultural Excellence, sebagai sebuah framework kepemimpinan digital holistik yang mengintegrasikan pendidikan etika berbasis Pancasila, keterampilan digital mutakhir, dan nilai-nilai keberlanjutan sosial. EthicRise berambisi melahirkan generasi pemimpin yang tidak hanya tech-savvy, tetapi juga value-driven dan socially responsible. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang menjawab tantangan Golden Indonesia 2045 bukan hanya dengan kecakapan, tetapi juga dengan kebijaksanaan.

Permasalahan penelitian ini berpusat pada belum tersedianya model kepemimpinan digital yang efektif secara teknis sekaligus berintegritas moral di tengah era bonus demografi. Permasalahan tersebut tampak pada tiga aspek yang saling berkaitan. Pertama, pembentukan pemimpin digital muda masih bertumpu pada penguasaan keterampilan teknis sehingga dimensi integritas moral belum mendapat tempat yang memadai. Kedua, komponen esensial

framework EthicRise yang memadukan nilai Pancasila, kompetensi digital, dan prinsip pembangunan berkelanjutan belum dirumuskan secara sistematis. Ketiga, pola penerapan framework tersebut secara sistemik dan terukur melalui kolaborasi multi-sektor belum tergambar dengan jelas.

Penelitian ini mendesak dan layak dilanjutkan karena tiga alasan. Pertama, generasi muda yang akan memimpin ruang digital sedang bergerak menuju puncak bonus demografi, sementara krisis kepemimpinan digital yang ditandai oleh kasus penipuan investasi, disinformasi, dan meningkatnya fraud menunjukkan bahwa kecakapan teknologi tanpa fondasi etika berpotensi merugikan masyarakat. Kedua, program pengembangan talenta digital yang ada masih berfokus pada technical skills dan belum menjawab keterputusan antara nilai kearifan lokal dengan tantangan digital kontemporer. Ketiga, Pancasila, gotong royong, dan musyawarah mufakat merupakan sumber daya normatif yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan model kepemimpinan digital nasional. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian etika kepemimpinan digital dengan landasan nilai Pancasila. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rujukan konseptual bagi pemerintah, lembaga pendidikan, industri digital, dan masyarakat sipil dalam merancang pengembangan pemimpin digital yang berorientasi pada dampak sosial jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research) yang bersifat preskriptif dan normatif. Metode yang digunakan adalah analisis konseptual (conceptual analysis) yang dikombinasikan dengan tinjauan pustaka terstruktur (structured literature review), dengan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Analisis konseptual dipilih karena objek kajian berupa gagasan framework EthicRise yang memerlukan konstruksi teoretis yang sistematis dan koheren, bukan pengujian hipotesis empiris berbasis data lapangan. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan hukum yang bersifat preskriptif dan normatif (Marzuki, 2010).

Tinjauan pustaka dilakukan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi teori-teori kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006), servant leadership (Greenleaf, 1999), etika digital (Floridi, 2018), teori ruang publik (Habermas, 1994), kecerdasan emosional dalam kepemimpinan (Goleman, 2007; Goleman et al., 2013), experiential learning (Kolb, 1984), virtue ethics (Aristoteles dalam Ross, 1999), serta teori sistem sosial (Luhmann, 1984). Selain sumber teoretis, kajian ini juga merujuk pada

data statistik terkini dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2023, 2024), Reuters Institute Digital News Report 2025 (Newman et al., 2025), dan laporan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital.
Relevansi EthicRise dinilai melalui pembandingan komparatif dengan program kepemimpinan digital nasional yang telah berjalan, antara lain Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, dan Young Leaders for Indonesia (YLI), serta regulasi terkait etika digital yang berlaku di Indonesia. Selain itu, analisis komparatif global dilakukan terhadap inisiatif serupa di Eropa, yakni Digital Ethics Compass dan AI4People, guna mengidentifikasi keunikan dan nilai tambah dari pendekatan EthicRise dalam konteks keindonesiaan.Bagian Metode biasanya merupakan bagian terpanjang kedua dalam Abstrak. Ini harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pembaca memahami apa yang telah dilakukan dan pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab dengan singkat di bagian Metode.

Diskusi dan Hasil

Konseptualisasi *EthicRise*: Menemukan Kembali Makna Kepemimpinan di Era Digital

Kemajuan digital telah mengubah wajah kepemimpinan secara fundamental. Ruang publik yang dahulu terbentuk melalui forum-forum fisik kini berpindah ke dunia maya yang tanpa batas, di mana opini dibangun bukan hanya melalui argumentasi, tetapi juga oleh algoritma. Dalam konteks inilah *EthicRise* menemukan relevansinya sebagai sebuah gagasan yang berupaya memulihkan dimensi kemanusiaan dalam kepemimpinan digital. *EthicRise* menolak pandangan bahwa teknologi merupakan instrumen yang netral, sebab di balik setiap inovasi senantiasa terdapat keputusan moral manusia yang tidak dapat diabaikan.

Fenomena penyebaran hoaks selama pandemi COVID-19 menjadi ilustrasi konkret betapa literasi digital tanpa dimensi etika hanya merupakan setengah jalan menuju kemajuan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020) mencatat sebanyak 1.401 sebaran isu hoaks di berbagai platform media sosial, dengan Facebook sebagai medium dominan yang menyumbang 71,82% dari total penyebaran, diikuti Twitter sebesar 26,96%, dan Instagram 1,22%. Fenomena ini memperlihatkan

bahwa pembangunan kompetensi digital tanpa fondasi etika justru berpotensi mempercepat degradasi kualitas informasi publik.

Secara konseptual, *EthicRise* dibangun di atas tiga landasan teoretis yang saling melengkapi. Pertama, teori kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006) yang menekankan bahwa pemimpin sejati mampu menginspirasi perubahan nilai, bukan sekadar pencapaian target. *EthicRise* memperluas makna transformasi ini melampaui dimensi organisasional menuju transformasi moral: di era digital, pemimpin tidak cukup hanya karismatik, ia harus otentik dan berintegritas nyata.

Kedua, teori *servant leadership* (Greenleaf, 1999) memberikan napas spiritual pada *EthicRise* dengan menegaskan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari dorongan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dalam budaya Indonesia yang berakar pada nilai gotong royong dan musyawarah, filosofi ini menemukan tanah yang subur. Pemimpin etis dalam konteks digital bukanlah mereka yang paling berpengaruh di media sosial, melainkan mereka yang paling peduli terhadap dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil.

Ketiga, Floridi (2018) menyebut pentingnya *soft ethics* dalam tata kelola digital, yakni kesadaran moral yang tidak semata-mata diatur oleh hukum, tetapi juga oleh tanggung jawab sosial yang bersumber dari hati nurani. Dalam kerangka *EthicRise*, prinsip ini menempatkan setiap klik, unggahan, dan desain teknologi sebagai tindakan yang mengandung konsekuensi etis yang nyata dan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. *EthicRise* dengan demikian berperan sebagai jembatan antara kompetensi teknologis dan refleksi moral.

Tiga Pilar *Framework EthicRise*

Implementasi *EthicRise* bertumpu pada tiga pilar yang saling menguatkan dan dirancang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pilar pertama adalah pembentukan karakter (*character building*). Dalam perspektif *EthicRise*, karakter bukan sekadar sikap, melainkan kebiasaan berpikir dan bertindak yang dibentuk melalui latihan reflektif

secara konsisten. Dalam dunia digital yang serba cepat dan penuh tekanan popularitas, kejujuran, empati, dan kesadaran diri menjadi nilai yang kerap diuji. Pendidikan karakter dalam *EthicRise* tidak berhenti pada ceramah moral, melainkan diwujudkan melalui pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), sebagaimana yang dikonsepsikan Kolb (1984), yang mencakup studi kasus etika media sosial, simulasi pengambilan keputusan dalam dilema etis, dan dialog reflektif yang terstruktur.

Pilar kedua adalah kompetensi digital beretika (*digital competence*). Literasi digital yang ideal dalam kerangka *EthicRise* tidak hanya berarti kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga pemahaman kritis terhadap bagaimana teknologi membentuk cara berpikir manusia. *EthicRise* mengajarkan peserta untuk memahami logika algoritma, mendeteksi bias data, mengelola keamanan siber, serta menganalisis dampak sosial dari inovasi digital. Mengacu pada *virtue ethics* Aristoteles, kebajikan bukan produk dari pengetahuan semata, melainkan buah dari kebiasaan bertindak baik secara konsisten (Ross, 1999). Prinsip ini diterjemahkan dalam *EthicRise* sebagai upaya membentuk individu yang tidak hanya "pintar teknologi," tetapi juga "bijak teknologi."

Pilar ketiga adalah aksi sosial berkelanjutan (*sustainable social impact*). Nilai dan kompetensi tidak akan bermakna tanpa tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat.

EthicRise mendorong generasi muda untuk mengembangkan proyek-proyek sosial berbasis teknologi, seperti kampanye literasi digital, inovasi berbasis lingkungan, dan pemberdayaan komunitas berbasis data. Gerakan Siberkreasi yang sejak 2017 berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia melalui edukasi etika bermedia sosial merupakan contoh nyata yang selaras dengan semangat pilar ini.

Integrasi Nilai Pancasila dalam *EthicRise*

Penting untuk dipahami bahwa etika dalam kepemimpinan digital tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Di Indonesia, di mana nilai kolektivitas dan keagamaan memiliki pengaruh yang mendalam, pembentukan etika digital harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut

secara serius. *EthicRise* menempatkan Pancasila sebagai panduan moral universal bagi pemimpin digital Indonesia, bukan sekadar kewajiban ideologis formal.

Sila pertama menanamkan kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan teknologi merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan dan sesama manusia. Sila kedua dan kelima menuntun penggunaan teknologi untuk memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mewujudkan keadilan sosial. Sementara itu, sila ketiga dan keempat menegaskan pentingnya persatuan nasional serta partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan digital. Melalui integrasi ini, *EthicRise* tidak sekadar mengadopsi teori kepemimpinan dari Barat, melainkan menanamkannya secara kritis ke dalam tanah nilai-nilai Indonesia yang kaya.

Model Implementasi dan Ekosistem Multi-Sektor

Dalam praktiknya, *EthicRise* menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* secara sinergis. Dari sisi struktural, dukungan institusional diperlukan untuk menciptakan regulasi dan kurikulum etika digital di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi. Namun, perubahan sejati harus tumbuh dari kesadaran individu. Setiap peserta *EthicRise* menjalani proses asesmen yang tidak hanya mengukur kemampuan teknis, tetapi juga kedewasaan moral dan kesiapan kepemimpinan.

Framework ini diimplementasikan melalui empat mekanisme utama: (1) *learning platform* berbasis digital yang dapat diakses secara luas; (2) *mentorship program* yang menghubungkan peserta dengan pemimpin digital beretika; (3) *ethical certification* sebagai pengakuan formal atas kompetensi etis; dan (4) *community of practice* yang membangun ekosistem saling dukung di antara para alumni. Program ini dirancang untuk menjangkau 64,16 juta pemuda Indonesia berusia 16 sampai 30 tahun (23,18% dari total populasi) sebagai kunci pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

EthicRise juga mempromosikan model kolaborasi lintas sektor yang dilandasi oleh teori sistem sosial Luhmann (1984), yang menegaskan bahwa integritas bukan hanya produk dari individu bermoral, melainkan

juga dari lingkungan sosial yang menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas. Dalam model ini, pemerintah berperan menciptakan kebijakan yang mendorong transparansi algoritma dan perlindungan data; lembaga pendidikan bertugas menanamkan nilai etika digital dalam kurikulum formal; industri teknologi didorong untuk memastikan inovasi yang dihasilkan berorientasi pada nilai kemanusiaan; sementara masyarakat sipil berperan mendorong terbentuknya budaya digital yang sehat dan empatik.

Untuk memastikan keberlanjutan finansial dan programatik, *EthicRise* mengembangkan model pendanaan hibrida yang memadukan dukungan CSR perusahaan teknologi, hibah pemerintah, dan kontribusi filantropi dari individu maupun lembaga. Pendekatan *train the trainer* memastikan dampak *EthicRise* meluas secara eksponensial tanpa bergantung sepenuhnya pada sumber daya pusat. Setiap modul pembelajaran juga dievaluasi melalui asesmen kuantitatif dan kualitatif, mengacu pada gagasan *action research* Lewin (1947) tentang penelitian yang tidak hanya mengamati, tetapi juga mengubah realitas sosial secara partisipatif.

Dampak *EthicRise* pada Tiga Tingkatan

Dampak *EthicRise* bekerja secara berjenjang pada tiga tingkatan yang saling terhubung. Pada tingkat individu, *EthicRise* menumbuhkan kesadaran bahwa kepemimpinan digital bukan tentang citra, melainkan tentang nilai. Goleman (2007) menegaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan kunci utama kepemimpinan yang efektif, yakni kemampuan memahami dan mengelola emosi sendiri serta orang lain. Dalam konteks digital, kemampuan ini terwujud dalam cara seseorang merespons kritik tanpa reaktif, menyebarkan informasi tanpa manipulasi, dan menginspirasi tanpa mendominasi.

Pada tingkat komunitas, *EthicRise* mendorong kolaborasi sosial lintas bidang. Para alumni program ini diharapkan menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing. Program "1000 Startup Digital" yang dicanangkan Kementerian Kominfo menjadi referensi konkret di mana banyak inovasi berbasis empati sosial di sektor pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi kreatif digerakkan oleh anak muda yang memadukan kecerdasan digital dengan kepekaan sosial. Hal tersebut merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip *EthicRise*. Penelitian Wardani et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan membuktikan bahwa peserta yang mengikuti pembelajaran digital yang diintegrasikan dengan pendidikan etika menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang lebih tajam sekaligus tumbuh rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap ruang digital yang mereka huni.

Pada tingkat nasional, *EthicRise* menawarkan strategi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknologis tetapi juga matang secara moral. Dalam ruang kebijakan publik, *EthicRise* selaras dengan arah besar pemerintah melalui GNLD Siberkreasi. Gagasan ini juga berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* PBB, khususnya Tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Penelitian Sauri (2023) yang mengkaji platform *crowdfunding* Kitabisa.com mempertegas argumen ini: teknologi digital yang digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan terbukti mampu membangkitkan perilaku altruisme dan menjadi instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan.

Perspektif Global dan Keunikan *EthicRise*

Dari perspektif komparatif, skandal *Cambridge Analytica* pada 2018 menjadi peringatan keras bagi dunia bahwa teknologi tanpa etika dapat merusak fondasi demokrasi (Isaak & Hanna, 2018). Di Indonesia, fenomena serupa tampak dalam penyebaran disinformasi politik selama Pemilu 2019. Handoko et al. (2023) mengonfirmasi bahwa generasi muda dengan literasi digital lebih tinggi menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang lebih matang dalam proses pemilu, yang menegaskan urgensi pendekatan *EthicRise* dalam konteks kepemimpinan demokratis.

Inisiatif seperti *Digital Ethics Compass* dan *AI4People* di Eropa memang telah menegaskan pentingnya etika dalam kebijakan teknologi. Namun, sebagian besar model Barat tersebut masih berfokus pada aspek regulasi dan tanggung jawab korporasi, bukan pada pembentukan karakter

individu. Di sinilah keunikan *EthicRise*: ia menempatkan individu sebagai pusat transformasi moral. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *Ubuntu* dari filsafat Afrika Selatan, yaitu "*I am because we are*" (Tutu, 1999), yang menegaskan bahwa etika selalu bersifat relasional dan tumbuh dari kesadaran bahwa eksistensi diri terhubung dengan kesejahteraan orang lain. Keunikan *EthicRise* terletak pada kemampuannya mengintegrasikan *wisdom* tradisional Indonesia dengan inovasi digital global menjadi sebuah *competitive advantage* yang khas dan berkelanjutan.

Kesimpulan

EthicRise menjawab kebutuhan mendesak akan model kepemimpinan baru di era digital, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan kecakapan teknologi, tetapi juga kedalaman etika dan tanggung jawab sosial. Seluruh pembahasan dalam kajian ini menegaskan bahwa kemajuan digital tanpa fondasi moral akan kehilangan arah dan maknanya. *EthicRise* hadir sebagai respons terhadap celah tersebut dengan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pusat dari segala inovasi, menjembatani logika algoritma dan suara nurani manusia.

Kajian ini menghasilkan beberapa temuan utama. Pertama, pembelajaran digital yang terbatas pada aspek keterampilan teknis tidak cukup untuk membentuk pemimpin yang berintegritas; dimensi etika harus diintegrasikan secara sistematis sejak awal. Kedua, nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan kearifan lokal Indonesia merupakan sumber daya normatif yang belum dioptimalkan dalam pengembangan model kepemimpinan digital nasional. Ketiga, *EthicRise* menawarkan *framework* yang mampu mengisi celah tersebut melalui tiga pilar yang saling menguatkan: pembentukan karakter, kompetensi digital beretika, dan aksi sosial berkelanjutan. Keempat, keberhasilan *EthicRise* mensyaratkan kolaborasi ekosistem multi-sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, industri digital, dan masyarakat sipil secara sinergis.

Sebagaimana diungkapkan Floridi (2018), masa depan etika digital bukan tentang menolak teknologi, melainkan tentang mengajarkan manusia cara menjadi manusia di tengah teknologi. *EthicRise* mewujudkan gagasan tersebut secara konkret dengan menjadikan etika sebagai DNA kepemimpinan. Untuk memastikan keberlanjutan gerakan ini, perlu dibangun jejaring kolaboratif yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku industri digital, dan komunitas masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat kebijakan pendidikan yang menanamkan etika digital sejak dini; lembaga pendidikan

perlu memperluas kurikulum berbasis nilai; dan sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial yang berorientasi pada literasi moral dan digital. Hanya melalui sinergi tersebut, revolusi digital Indonesia akan benar-benar bertransformasi menjadi revolusi kemanusiaan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Bibliografi

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Proyeksi penduduk Indonesia 2020–2050: Hasil sensus penduduk 2020. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/08/30/f4b846f397ea452bdc2178b3/statistik-telekomunikasi-indonesia-2023.html

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Floridi, L. (2018). Soft ethics and the governance of the digital. Philosophy and Technology, 31(1), 1–8. https://doi.org/10.1007/s13347-018-0303-9

Goleman, D. (2007). Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. Bantam Books.

Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2013). Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence. Harvard Business Review Press.

Greenleaf, R. K. (1999). Servant Leadership. Paulist Press.

Habermas, J. (1994). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press.

Handoko, W., Setyoko, P. I., & Kurniasih, D. (2023). Youths' digital literacy skills: Critical thinking to participate in elections. Journal of Local Government Issues, 6(1), 19–34. https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.23229

Isaak, J., & Hanna, M. J. (2018). User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection. Computer, 51(8), 56–59.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020, 8 Mei). Kominfo temukan 1.401 sebaran isu hoaks terkait Covid-19. https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/kominfo-temukan-1-401-sebaran-isu-hoaks-terkait-covid-19

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall.

Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics. Human Relations, 1(1), 5–41. https://doi.org/10.1177/001872674700100103

Luhmann, N. (1984). Social Systems. Stanford University Press.

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.

Newman, N., Arguedas, A. R., Robertson, C. T., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). Reuters Institute Digital News Report 2025. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://doi.org/10.60625/risj-8qqf-jt36

Panggabean, A. D. (2024, 29 Mei). Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024. Radio Republik Indonesia. https://rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024

Ross, D. (Trans.). (1999). Nicomachean Ethics: Aristotle. Oxford University Press.

Sauri, S. (2023). Altruisme masyarakat Indonesia melalui platform crowdfunding di Kitabisa.com. ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(1), 273–280. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.953

Tutu, D. (1999). No Future Without Forgiveness. Doubleday.

Wardani, S. K., Ardjaka, S., & Sapta, A. (2024). Developing integrated learning based on digital literacy and ethics in Indonesian subjects. Jurnal Elementaria Edukasia, 7(4), 3399–3410. https://doi.org/10.31949/jee.v7i4.11654